



EDISI SENIN 13 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA*Inspirasi Perubahan***TODAY****02**

GOVERNMENTTODAY

Koperasi Desa Kini Boleh Garap Tambang, Sumur Minyak, CPO hingga PLTS

04

NUSANTARA

Kecelakaan Maut Pantura Indramayu

Pikap Rombongan Pengantin Tertabrak Truk, 11 Orang Tewas

10

LISTSTYLE

Skincare Remaja Tak Perlu Rumit, 4 Langkah Sederhana Paling Efektif

MENAKAR NYALI GEDUNG BUNDAR

Pelimpahan Kasus Febrie dari Polisi ke Kejaksaan Langgar Prosedur KUHAP?

Pelimpahan penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah, dari Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Sejumlah pakar mempertanyakan dasar hukum pelimpahan horizontal tersebut. Sebab mekanisme pengalihan perkara pada tahap penyidikan tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Diketahui, Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia diduga terlibat dalam sejumlah perkara, di antaranya dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU, perkara Asabri dan Jiwasraya, serta penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Dalam perkara kakap ini, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha swasta, Don Ritto (DR). Sebelumnya, kepolisian melakukan penggeledahan di 13 lokasi yang tersebar di Jakarta dan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut sempat memunculkan dinamika di lapangan antara aparat Polri, Kejaksaan, dan unsur TNI yang berada di sekitar lokasi pengamanan. Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan, uang tunai sekitar US\$4,7 juta, SGD14,08 juta, serta sejumlah mata uang asing lainnya dengan nilai total mencapai ratusan miliar rupiah. Publik menanti

aksi dari Gedung Bundar-- sebutan kantor Jampidsus. **BACA HAL 11...**

Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU (2018-2026)

- Dugaan penyimpangan pengadaan dan distribusi batu bara PLTU.
- Diduga memicu gangguan pasokan hingga blackout di sejumlah wilayah.
- Kerugian negara diperkirakan **Rp5 triliun.**
- Disangkakan UU Tipikor dan TPPU.

Dugaan Korupsi PT Asabri

- Terkait dugaan korupsi pengelolaan investasi PT Asabri.
- Diduga berkaitan dengan penanganan perkara tersebut.
- Disangkakan UU Tipikor dan TPPU.

Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

- Terkait dugaan korupsi pengelolaan investasi PT Jiwasraya.
- Diduga berkaitan dengan penanganan perkara.
- Disangkakan UU Tipikor dan TPPU.

**3 PERKARA
YANG MENJERAT
EKS JAMPIDSUS
FEBRIE**



KOPERASI DESA KINI BOLEH GARAP TAMBANG, SUMUR MINYAK, CPO HINGGA PLTS

Pemerintah memperluas izin usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ke berbagai sektor industri riil. Mulai saat ini, koperasi desa diizinkan mengelola sumur minyak bumi, tambang mineral, pabrik kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), hingga pembangkit listrik.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan, perluasan izin ini bertujuan memberikan ruang bagi koperasi untuk masuk ke sektor industri strategis yang selama ini terbatas.

"Kemudian memperbolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor, mengelola sumur minyak rakyat atau idle well. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral," kata Ferry dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Ferry memaparkan beberapa proyek industri yang saat ini sudah berjalan di tingkat desa. Di sektor perkebunan, Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, telah membangun pabrik pengolahan CPO. Pabrik tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Selain sawit, koperasi desa juga merambah bisnis penyediaan energi. Ferry menyebutkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 Megawatt di Semburlaut, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau, akan dioperasikan



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).ist

oleh koperasi desa pada Agustus mendatang.

Sampai dengan Juli 2026, Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 15.845 unit Koperasi Desa Merah Putih telah terbangun dari total target keseluruhan sebanyak 81.000 unit di seluruh Indonesia.

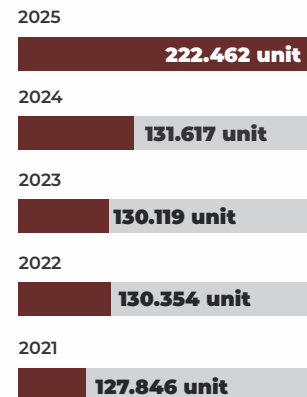
Prabowo: Semua Distribusi Subsidi

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa seluruh komoditas bersubsidi dari pemerintah

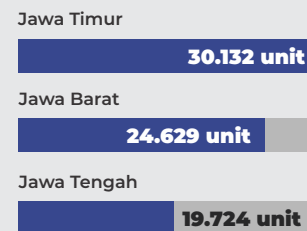
wajib disalurkan satu pintu melalui jaringan koperasi desa. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka penyelewengan distribusi barang di lapangan.

"Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," kata Prabowo.

TREN JUMLAH KOPERASI AKTIF (NASIONAL)



PROVINSI DENGAN KOPERASI TERBANYAK



Sumber: BPS pada 24 Maret 2026

Kritik Prabowo di Harkopnas:

Sentil 'Bajingan' Politik hingga Kebijakan Neoliberal

Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap dinamika partai politik dan arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Dalam pidatonya, ia menyoroti keberadaan kelompok yang merugikan di dalam parpol serta dominasi paham ekonomi neoliberal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Prabowo menyatakan bahwa setiap partai politik di Indonesia sebenarnya memiliki kader yang berjiwa patriot. Namun, ia tidak memungkiri adanya oknum-oknum yang dinilai merusak dari dalam.

"Untuk apa kita bertikai, kita ini satu keluarga apa pun latar belakang

kita, apa pun suku kita, apa pun partai kita. Semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga," ujar Prabowo.

Ia sempat berseloroh dan menanyakan penggunaan kata tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dengan dalih istilah itu dipengaruhi oleh latar belakang budayanya yang lahir di Betawi. Prabowo kemudian meminta seluruh elemen bangsa untuk menghentikan budaya cacik dan saling curiga demi menjaga persatuan nasional.

Selain menyentil internal partai politik, Prabowo mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak asing yang datang dengan kedok aktivitas perdagangan, namun berujung pada eksploitasi kekayaan alam Indonesia secara ilegal.

"Itu sifat kita bahwa kita suka dengan tamu. Hanya kadang-kadang

ada tamu tidak tahu diri. Sudah tidak diundang, datang ke sini, katanya mau dagang, lama-lama ngerampok," ungkapnya.

Prabowo menilai keramahan masyarakat Indonesia sering kali dimanfaatkan oleh pihak luar, padahal kekayaan yang dibawa lari ke luar negeri tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan dalam negeri. Atas dasar itu, ia menyatakan komitmennya bersama kabinet untuk menerapkan strategi kerja dengan gagasan besar guna menghentikan kebocoran sumber daya tersebut.

Di sektor ekonomi, Prabowo secara spesifik mengkritik penerapan paham neoliberal yang diadopsi di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Menurutnya, konsep ekonomi tersebut bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. (tin,kcm,kum/dya)

Prabowo menjelaskan, rencana pengembangan KDKMP mencakup pembukaan berbagai unit usaha di dalam satu kawasan koperasi. Lini bisnis tersebut meliputi toko sembako, layanan simpan pinjam, logistik desa, gudang, fasilitas ruang pendingin (cold storage), hingga apotek.

"Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotik di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin. Supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya," ujarnya.

Selain koperasi di sektor pertanian dan industri, pemerintah juga membentuk koperasi nelayan di wilayah pesisir. Unit usaha koperasi nelayan ini akan mengelola aset produktif seperti pabrik es, gudang pendingin, dan kapal penangkap ikan berukuran besar.

Fasilitas tersebut diberikan melalui sistem pinjaman atau pembiayaan bergulir, bukan sebagai hibah tetap.

"Dan mereka bukan terima, mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali," tutur Prabowo. (wid,rls,kum/dya)

VIRAL RUU PERAMPASAN ASET DICORET, DPR MENEPIS

Polemik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mencuat setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut regulasi tersebut telah dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membantah kabar tersebut dan menegaskan RUU Perampasan Aset tetap menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026 serta masih disusun oleh Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan tidak pernah ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang mengeluarkan RUU Perampasan Aset dari Prolegnas Prioritas 2026.

"Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI," ujar Martin, Minggu (12/7).

Martin menjelaskan Komisi III DPR hingga kini masih menyusun RUU Perampasan Aset melalui rapat-rapat yang berlangsung secara intensif. Dalam proses tersebut, DPR mengundang pakar, akademisi, organisasi nonpemerintah (NGO), hingga praktisi guna memperoleh masukan terhadap substansi regulasi.

"RUU Perampasan Aset telah disepakati dalam Prolegnas oleh DPR dan pemerintah. Artinya, DPR dan pemerintah concern untuk menyusun RUU ini dengan sebaik-baiknya dan melibatkan partisipasi publik dalam perumusan norma-normanya," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sempat viral di media sosial. Di tengah perhatian publik terhadap berbagai perkara korupsi besar, keberadaan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan karena dinilai dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dari hasil tindak pidana.

Sebelumnya, Komisi III DPR memberi sinyal bahwa cakupan regulasi ini tidak lagi hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga berpotensi diterapkan terhadap kejahatan serius lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan saat ini masih difokuskan pada pendalaman substansi melalui mekanisme meaningful participation atau pelibatan publik secara bermakna. Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat dengan kementerian, lembaga, akademisi, hingga para ahli hukum untuk menyempurnakan materi rancangan undang-undang tersebut.

"Saat ini Komisi III sedang melaksanakan meaningful participation publik melalui rapat dengar pendapat bersama instansi-instansi terkait maupun para ahli hukum dalam rangka penyusunan RUU



Mahasiswa menunjukkan poster pengesahan RUU Perampasan Aset.(dok)

Perampasan Aset," ujar Bob, Rabu (8/7).

Menurut Bob, salah satu gagasan yang mengemuka dalam pembahasan ialah menjadikan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang mengikuti tindak pidana asal (predicate crime). Dengan skema tersebut, penerapannya tidak hanya terbatas pada perkara korupsi, melainkan juga dapat menyasar tindak pidana narkoba, terorisme, serta berbagai kejahatan berat lainnya.

"RUU Perampasan Aset juga berpotensi menjadi pidana tambahan terhadap tindak pidana pokok, tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan narkoba, terorisme, dan tindak pidana lainnya," katanya.

Wacana perluasan cakupan itu menunjukkan bahwa DPR tidak hanya ingin memperkuat upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi, tetapi juga memutuskan sumber pendanaan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi.

Di sisi lain, perluasan kewenangan tersebut menjadi salah satu isu paling sensitif dalam pembahasan karena DPR harus memastikan aturan yang disusun mampu memburu aset hasil kejahatan tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan tersebut menambah panjang perjalanan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir hampir dua dekade. Regulasi ini pertama kali digagas pada 2008 dan hingga kini belum juga berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Hampir 2 Dekade

Sesungguhnya, perjalanan RUU Perampasan Aset telah berlangsung hampir dua dekade. Gagasan penyusunannya pertama kali muncul

pada 2008 ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama sejumlah pakar hukum menyusun naskah akademik mengenai mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana.

Saat itu, muncul kebutuhan akan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar aset hasil kejahatan yang kerap lebih dahulu disembunyikan, dialihkan kepada pihak lain, atau dipindahkan ke luar negeri sebelum pelaku memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Melalui rancangan tersebut, Indonesia berupaya mengadopsi konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture), yaitu mekanisme yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Konsep ini berbeda dengan sistem yang selama ini berlaku di Indonesia, yang menitikberatkan pembuktian terhadap pelaku (in personam). Dalam RUU Perampasan Aset, fokusnya bergeser pada asal-usul harta kekayaan (in rem), sehingga aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah dapat diproses melalui mekanisme peradilan. Gagasan tersebut dinilai penting karena selama ini penegak hukum sering menghadapi kesulitan memulihkan kerugian negara.

Dalam banyak perkara korupsi, aset hasil kejahatan telah lebih dahulu dipindahkan, dicuci melalui berbagai transaksi, atau ditempatkan atas nama pihak lain sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Akibatnya, negara kerap berhasil memenjarakan pelaku, tetapi gagal memulihkan seluruh aset hasil kejahatan.

PERJALANAN RUU PERAMPASAN ASET

FASE 1: Inisiasi (2003-2012)

- 2003 — PPATK menginisiasi konsep RUU Perampasan Aset.
- 2008-2012 — Penyusunan draf awal, namun pembahasan terhenti.

FASE 2: Usulan ke DPR (2019-2024)

- 2019 — Draft diajukan ke Prolegnas 2020, tetapi ditolak DPR.
- Mei 2023 — Presiden Joko Widodo mengirim Surpres, namun pembahasan tak berlanjut hingga akhir masa jabatan DPR.

FASE 3: Masuk Prolegnas Prioritas (2025)

- 1 September 2025 — Masuk Prolegnas Jangka Menengah, didukung Presiden Prabowo Subianto.
- 23 September 2025 — DPR menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025-2026.

FASE 4: Pembahasan (2026-Sekarang)

- 15 Januari 2026 — Komisi III mulai membahas Naskah Akademik dan draf RUU.
- Maret-Juni 2026 — RDPU dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
- Juli 2026 — Uji publik bersama mahasiswa dan organisasi profesi untuk menyerap masukan serta mencegah penyalahgunaan wewenang.



Naskah akademik RUU Perampasan Aset rampung pada 2012. Namun sejak saat itu, pembahasannya berulang kali mengalami hambatan. RUU tersebut beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, termasuk pada 2020 dan 2021, tetapi tidak pernah berlanjut hingga tahap pengesahan. Pembahasan selalu tertunda akibat padatannya agenda legislasi maupun dinamika politik di DPR.

Momentum baru muncul pada Mei 2023 ketika Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-22/Pres/05/2023 kepada DPR RI. Surpres tersebut menjadi dasar resmi dimulainya pembahasan RUU bersama pemerintah. Namun hingga berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, pembahasan belum berhasil diselesaikan.(tin,ist,kpn/dya)

Kecelakaan Maut Pantura Indramayu

PIKAP ROMBONGAN PENGANTIN TERTABRAK TRUK, 11 ORANG TEWAS

INDRAMAYU-Kecelakaan maut terjadi di Jalur Pantura, tepatnya di kawasan Kiajuran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu sore (12/7/2026). Insiden yang melibatkan truk tronton, mobil pikap, dan kendaraan bak terbuka itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia.

Mobil pikap bernomor polisi E 8559 RB yang membawa rombongan pengantar pengantin menjadi kendaraan yang mengalami kerusakan paling parah setelah dihantam truk tronton bernomor polisi E8846 BA.

Benturan keras membuat bagian belakang dan badan pikap ringsek. Sejumlah penumpang yang berada di bak terbuka terpelempar ke badan jalan akibat kuatnya tabrakan.

Berdasarkan keterangan kepolisian, pikap tersebut membawa 17 orang rombongan pengantin. Kendaraan itu diketahui sedang dalam perjalanan kembali menuju wilayah Lelea setelah sebelumnya melaju dari arah Cirebon.

Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif Hidayat mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil pikap hendak melakukan putar arah di kawasan Kiajuran.

"Mobil mau balik ke Lelea. Kemudian mobil tersebut mau muter arah di Kiajuran, nah kemudian



Polisi memeriksa mobil bak terbuka yang mengalami kecelakaan di jalur Pantura Kiajuran Kulon, Kecamatan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (12/7/2026). (ANTARA)

tertabrak oleh truk Hino sehingga (mobil pikap) terdorong ke depan," kata Undang.

Sementara itu, informasi lain menyebutkan pikap yang dikemudikan Warsidi tersebut sebelumnya melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Saat berada di lokasi kejadian, kendaraan diduga hendak berputar arah di Jalur Pantura.

Pada saat bersamaan, truk tronton yang melaju dari arah belakang dengan tujuan Cikampek menuju Semarang berada dalam jarak yang terlalu dekat. Tabrakan pun tidak dapat dihindari.

Pengemudi truk tronton, Deden Ibad, mengakui kendaraan yang dikemudikannya menabrak pikap dari

arah belakang.

"Nabrak dari belakang. Truk ini dari Cikampek mau menuju Semarang," ujar Deden saat dimintai keterangan.

Akibat kecelakaan tersebut, tiga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara delapan korban lainnya dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

"Akibat kejadian itu, tiga orang meninggal dunia di TKP," ujar Undang.

Ia menambahkan, jumlah korban keseluruhan terdiri atas 11 orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, dan enam orang mengalami luka ringan.(wid,ist/dya)

DATA KORBAN KECELAKAAN MAUT PANTURA INDRAMAYU

KORBAN MENINGGAL DI TKP (3)

- Mohamad Iqbal (12) — Pelajar, Lohbener.
- Sawen (40) — IRT, Lelea.
- Ayu Wulandari (32) — IRT, Lelea.

KORBAN MENINGGAL DI RS (7)

- Karsinih (60) — IRT, Lelea.
- Sinta (32) — IRT, Cikedung.
- Sanerah (46) — IRT, Lelea.
- Riyan Toni (6) — Pelajar, Lohbener.
- Idah (39) — Petani, Lelea.
- Yunah (49) — IRT, Lelea.
- Atsal Albara (3) — Lelea.

KORBAN LUKA BERAT (2)

- Warkidi (45) — Pekerja swasta, Lelea.
- Tamara (22) — IRT, Lohbener.

KORBAN LUKA RINGAN (6)

- Olivia (4) — Lelea.
- Bayu Kelana (8) — Pelajar, Lelea.
- Wandi (29) — Wiraswasta, Lelea.
- Saba (11) — Pelajar, Lelea.
- Jesika (2) — Lelea.
- Salma Yanti (4) — Lelea.

Ibu rumah tangga (IRT)

3 Orang Tewas saat Tidur dalam Kebakaran Ruko Pulogadung, Pemicu Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA-Kebakaran melanda sebuah ruko yang sekaligus digunakan sebagai rumah, toko kelontong, dan warung makan di kawasan permukiman padat Jalan Palad RT 02/RW 03, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari (12/7/2026).

Peristiwa yang terjadi saat sebagian besar warga masih terlelap itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Para korban diduga tidak sempat menyelamatkan diri setelah api dengan cepat membesar dan melahap bangunan tempat mereka berada.

Tiga korban meninggal dunia masing-masing berinisial ES (67), LF (40), dan RM (10). Ketiganya

ditemukan petugas dalam satu rumah yang terbakar saat proses evakuasi berlangsung.

"Tiga korban tewas, yakni ES (67), LF (40), dan RM (10). Mereka dimakamkan di TPU Rawa Teratai," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Kapolsek Pulogadung Kopol Gomos Simamora mengatakan, ketiga korban ditemukan berada di dalam satu rumah yang menjadi bagian dari bangunan yang terbakar.

"Korban meninggal dunia ditemukan dalam satu rumah," ujar Gomos.

Ia mengatakan, penyebab pasti kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui awal mula munculnya api.

"Masih dalam proses lidik untuk penyebab pasti kebakaran," kata Gomos.

Kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Saat kejadian, api melahap satu unit rumah, toko kelontong, serta

warung nasi yang berada dalam kawasan permukiman padat penduduk.(wid,rls/dya)



Kebakaran melanda ruko dan tempat usaha di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Minggu (12/7/2026) dini hari menewaskan 3 orang. (Instagram / @damkarjakartatimur)

B50 BERLAKU, INDONESIA PANGKAS IMPOR SOLAR HINGGA 310 RIBU BAREL PER HARI

Indonesia resmi memasuki era baru energi terbarukan melalui penerapan mandatori biodiesel B50. Kebijakan ini menjadikan bahan bakar diesel nasional mengandung campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan program mandatori B50. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar Sebesar 50 persen dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan program B50 akan memberikan dampak besar terhadap ketahanan energi nasional. Pertamina memperkirakan kebijakan tersebut dapat mengurangi impor solar hingga sekitar 18 juta kiloliter pada 2026 atau setara dengan 310 ribu barel per hari.

Pengurangan impor tersebut terjadi karena kebutuhan solar nasional yang selama ini masih dipenuhi sebagian dari luar negeri dapat digantikan dengan biodiesel berbasis sawit produksi dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut konsumsi solar Indonesia berada di kisaran 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Sebelum penerapan B50, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 hingga 4 juta kiloliter solar setiap tahun.

Dengan diberlakukannya B50, pemerintah memastikan Indonesia tidak lagi melakukan impor produk solar.

"Dengan implementasi B50, alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," kata Bahlil.

Selain mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri, pemerintah juga memperkirakan B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun atau sekitar USD10 miliar.

Prabowo menyebut penghematan tersebut menjadi salah satu manfaat besar dari program biodiesel nasional. Ia mengungkapkan sebelumnya memiliki gagasan agar Indonesia langsung menuju penggunaan biodiesel B100, namun pemerintah memilih menerapkan B50 terlebih dahulu karena dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan energi nasional.

Dari sisi ekonomi, implementasi B50 diperkirakan meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional. Nilai tambah CPO diproyeksikan naik dari



sekitar Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun. Program ini juga diperkirakan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina memastikan kesiapan infrastruktur

untuk mendukung distribusi B50. Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan 126 terminal BBM untuk menyalurkan biodiesel campuran solar 50 persen ke berbagai wilayah Indonesia.

Distribusi B50 dilakukan secara bertahap melalui SPBU dan agen

penyalur minyak solar sesuai arahan Kementerian ESDM. Pertamina juga memastikan kualitas produk yang disalurkan telah memenuhi standar pemerintah.

Masa transisi penerapan B50 diberlakukan selama dua bulan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia. Selama masa peralihan tersebut, distribusi B50 dilakukan secara bertahap hingga seluruh penyaluran solar menggunakan campuran biodiesel 50 persen. (wid,ist/dya)

PERBANDINGAN TEKNIS BIODIESEL B40 & BIODIESEL B50

Komposisi Campuran

- 40% FAME + 60% Solar Fosil
- 50% FAME + 50% Solar Fosil

Kadar Air Maksimal

- 320 ppm (mg/kg)
- 300 ppm (mg/kg)

Kandungan Monogliserida

- Maksimal 0,5% massa
- Maksimal 0,47% massa

Angka Setana (Cetane)

- Minimal 51
- Minimal 51

Emisi Opasitas Gas Buang

- Turun ~4,6% dibanding B30
- Turun ~10,52% dibanding B30



OJK Warning Kenaikan Harga BBM Bisa Tekan Kualitas Multifinance

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026 berpotensi memberikan tekanan terhadap industri pembiayaan kendaraan bermotor atau multifinance.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kenaikan harga BBM dapat memengaruhi kemampuan bayar sebagian debitur, sehingga berpotensi berdampak terhadap kualitas pembiayaan perusahaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan peningkatan biaya bahan bakar dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keuangan masyarakat, khususnya debitur kendaraan bermotor.

"Kenaikan harga BBM berpotensi memengaruhi kemampuan bayar sebagian debitur dan kualitas pembiayaan multifinance," ujar Agusman dalam keterangan tertulis Rapat Dewan Komisiner OJK.

Namun, di sisi lain, kenaikan harga BBM juga dinilai dapat menjadi momentum bagi pertumbuhan kendaraan listrik. Masyarakat berpotensi mulai mempertimbangkan kendaraan yang lebih hemat energi karena biaya operasional yang lebih rendah dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

OJK mencatat pembiayaan kendaraan listrik oleh perusahaan multifinance terus mengalami pertumbuhan. Hingga Mei 2026, total pembiayaan kendaraan listrik roda dua dan roda empat mencapai Rp23,94 triliun atau meningkat 32,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, pembiayaan mobil listrik roda empat mencapai Rp20,06 triliun. Angka itu tumbuh 29,16 persen secara tahunan dengan porsi sekitar 3,69 persen dari total pembiayaan multifinance.

Meski pertumbuhannya meningkat, Agusman menyebut sektor kendaraan listrik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah resale value atau harga jual kembali kendaraan

listrik yang masih menjadi pertimbangan bagi konsumen maupun perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, peningkatan minat masyarakat serta penguatan ekosistem kendaraan listrik menjadi kunci agar pembiayaan kendaraan listrik dapat terus berkembang.

Di sisi lain, OJK mencatat total piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp513,19 triliun hingga Mei 2026. Nilai tersebut tumbuh 1,71 persen secara tahunan atau year on year (YoY). (wid,ist/dya)

Antisipasi Kebakaran, TPA Supit Urang Disiram Bakteri Limbah Susu

MALANG- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mengantisipasi terjadinya kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang selama musim kemarau. Salah satu langkahnya dengan menyirami area timbunan sampah menggunakan bakteri hasil olahan limbah susu.

"Memang kami tekankan agar m"Kami melaksanakan penyiraman di area timbunan sampah supaya tidak terlalu panas. Karena memang kondisi cuacanya saat ini cukup panas sekali," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, dikutip pada Minggu (12/7/2026).

Berbeda dengan penyiraman menggunakan air biasa, cairan yang digunakan di TPA Supit Urang merupakan bakteri hasil olahan limbah susu. Menurut Raymond, cairan tersebut berfungsi membantu mengurangi produksi gas metana yang menjadi salah satu pemicu kebakaran di TPA.

"Bakterinya dalam bentuk cairan, yang fungsinya juga meminimalisir gas metan. Karena memang salah satu penyebab kebakaran itu tingginya gas

metan," jelasnya.

Raymond mengungkapkan, sebelumnya gas metana di TPA Supit Urang sempat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Namun, fasilitas tersebut tidak lagi beroperasi setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi sekitar 4 hingga 5 tahun lalu.

Karena itu, penyiraman menggunakan bakteri limbah susu menjadi salah satu solusi untuk menekan pembentukan gas metana di area penimbunan sampah. "Akhirnya kami untuk meminimalisir timbulnya gas metan adalah dengan penyiraman dari limbah susu itu tadi," tambahnya.

Raymond menyebut, penyiraman dilakukan secara berkala sebanyak 2 kali dalam sepekan dengan cakupan area sekitar 8 hektare di TPA Supit Urang. "Dalam satu minggu kami melaksanakan dua kali penyiraman dengan area luasan kurang lebih sekitar delapan hektare," katanya.

Tak hanya itu, Raymond juga mengatakan petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Supit Urang secara rutin melakukan pengurukan sampah menggunakan tanah sebagai salah

satu upaya mencegah munculnya titik api. DLH Kota Malang, lanjutnya, juga mengatur waktu pengiriman sampah ke TPA sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko kebakaran.

"Antisipasi di TPA terus kami lakukan termasuk dengan proses pengiriman sampah yang kami atur waktunya," imbuhnya.

Langkah antisipasi tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kewaspadaan nasional terhadap kebakaran TPA selama musim kemarau.

Sebelumnya, kebakaran terjadi di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, yang sempat menghanguskan sekitar 70 persen area.

Berdasarkan pembaruan per 5 Juli 2026 yang dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup, setelah 6 hari penanganan intensif, luasan titik kritis berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 3,6 persen.



Gunungan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Kecamatan Sukun, Kota Malang. (Santi/Lentera)

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada Kondisi Cuaca Panas Ekstrem.(Santi/Dya)

Pemasangan 809 PJU di Malang Baru 40% Terealisasi dengan Serapan Dana Rp3 M

Ilustrasi: Salah satu titik Penerangan Jalan Umum di Jalan Pangestu, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)



MALANG - Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk menambah 809 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar di 25 kecamatan. Namun hingga pertengahan tahun 2026, realisasi baru 35-40 persen dari target.

Kepala Bidang Fasilitas Jalan DPUBM Kabupaten Malang Susandi Arif mengatakan, hingga awal Juli 2026, serapan keuangan program tersebut baru

mencapai sekitar Rp3 miliar.

"Per awal Juli, realisasi keuangan telah mencapai lebih dari Rp 3 miliar, dengan progres sekitar 35-40 persen berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan di lapangan," ujar Sandi, Minggu (12/7/2026).

Menurutnya, capaian tersebut masih sesuai dengan tahapan pekerjaan. Sebab, progres fisik tidak hanya dihitung dari jumlah PJU yang telah berdiri, tetapi mencakup seluruh rangkaian pelaksanaan.

Mulai dari pengadaan material, pemasangan, pengujian, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan kontrak. Sementara itu, pencairan anggaran dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan pekerjaan.

Sandi menyebutkan, ratusan PJU tersebut akan tersebar di 25 kecamatan. Di antaranya Jabung, Kalipare,

Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak. Menurutnya, penentuan lokasi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, tingkat kebutuhan, aspek keselamatan lalu lintas, serta kemampuan anggaran daerah. "Saat ini, DPUBM mengelola sekitar 1.317 titik PJU," katanya.

Ribuan PJU tersebut tidak hanya berada di jalan kabupaten yang memiliki total panjang sekitar 1.644 kilometer, tetapi juga tersebar di jalan desa dan jalan poros.

Sandi mengatakan, cakupan PJU belum dapat dinyatakan secara langsung dalam bentuk persentase. Namun, pihaknya mengakui kebutuhan penerangan jalan masih besar dan berpotensi terus bertambah. "Penambahan ratusan titik penerangan di tahun ini juga memang masih belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan di Kabupaten Malang. Tetapi kami terus upayakan," tutur Sandi.

Karena itu, menurutnya penambahan PJU dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Sebelumnya, Kepala DPUBM

Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma mengatakan, pemasangan PJU diprioritaskan pada ruas jalan polos yang menjadi kewenangan Pemkab Malang atau berstatus K1, terutama di lokasi dengan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi.

Pemasangan PJU tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan, tetapi juga keamanan pengguna jalan, baik dari sisi sosial maupun keselamatan berlalu lintas. Namun, keterbatasan anggaran membuat jarak antar-PJU dipasang lebih renggang dari kondisi ideal.

"Jarak pemasangannya 100 meter. Seharusnya 50 meter, tetapi kami tidak mampu karena ada efisiensi," ujar pria yang akrab dengan sapaan Oong tersebut.

Selain mempertimbangkan tingkat kerawanan, lokasi pemasangan juga mengacu pada usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). "Di sekitar fasilitas pendidikan dan kesehatan juga kami pastikan akan menjadi prioritas," pungkasnya.(Santi/Dya)

Menyusul serangan ketiga AS, Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan AS di sejumlah negara kawasan Teluk Persia. (Foto arsip Komando Pusat AS)



SELAT HORMUZ KEMBALI TERKUNCI, KRISIS ENERGI MENGINTAI

Selat Hormuz kembali menjadi titik panas konflik Iran-Amerika Serikat. Iran menutup jalur pelayaran strategis itu untuk keempat kalinya sejak perang pecah pada awal 2026. Penutupan terbaru terjadi setelah rangkaian serangan, insiden terhadap kapal komersial, serta gagalnya upaya mempertahankan gencatan senjata.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Minggu (12/7/2026). Teheran menyatakan jalur tersebut akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.

IRGC menuding Amerika Serikat berupaya menciptakan gangguan di kawasan selatan Selat Hormuz. Pengendalian jalur laut tersebut menjadi salah satu isu utama dalam ketegangan antara Washington dan Teheran.

"Pengendalian jalur air tersebut, yang dulunya dilalui seperlima minyak mentah dan gas alam cair dunia, telah menjadi inti dari negosiasi AS-Iran," demikian laporan Bloomberg.

Penutupan terbaru terjadi setelah kapal komersial kembali menjadi sasaran. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pasukan Iran menyerang kapal kontainer berbendera Siprus, M/V GFS Galaxy.

Kapal tersebut mengalami kerusakan signifikan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Satu awak sipil dilaporkan meninggal dunia.

Iran kemudian menyatakan telah menghentikan kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz meski telah mendapatkan peringatan.

"IRGC mengatakan tidak akan mengizinkan kapal apa pun untuk lewat sampai campur tangan asing berakhir," demikian laporan kantor berita pemerintah Iran, IRIB News.

Penutupan terbaru menjadi yang keempat sejak konflik Iran-Amerika

Serikat pecah.

Penutupan pertama terjadi pada 28 Februari 2026, setelah Iran merespons serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayahnya.

Penutupan kedua berlangsung pada 11 Juni 2026. IRGC kembali menghentikan pelayaran setelah serangkaian serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Penutupan ketiga terjadi pada 20 Juni 2026, hanya tiga hari setelah kesepakatan gencatan senjata Iran-Amerika Serikat. Iran menuding kesepakatan tersebut dilanggar setelah sekutu Washington, Israel, melancarkan serangan di Lebanon Selatan.

AS Desak Iran Buka Hormuz

Amerika Serikat meminta Iran segera membuka kembali seluruh jalur pelayaran di Selat Hormuz dan menghentikan serangan terhadap kapal komersial.

Seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan Washington menginginkan pernyataan terbuka dari Teheran mengenai kebebasan pelayaran.

"Yang kamiuntut adalah agar pihak Iran mengeluarkan pernyataan publik yang mengakui bahwa semua jalur di Selat Hormuz terbuka dan mereka tidak lagi menembaki kapal-kapal," kata pejabat tersebut.

Ia menegaskan, Iran akan menghadapi konsekuensi jika

tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

"Mereka akan memberikan pernyataan itu kepada kami atau hasilnya tidak akan baik bagi mereka," ujarnya.

Pejabat tersebut juga mengatakan Amerika Serikat masih membuka ruang pembicaraan dengan Iran.

"Kami berharap bisa mencapai titik di mana mereka secara terbuka mengatakan akan berhenti menembaki kapal-kapal dan secara eksplisit atau setidaknya secara implisit mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kami sedang mengupayakan hal itu sekarang," katanya.

Ia menambahkan, Presiden Trump telah mengarahkan pemerintahannya untuk tetap membuka jalur diplomasi.

"Presiden telah mengarahkan kami untuk berbicara, tetapi seperti yang telah ia tunjukkan, jika mereka terus menembaki kapal-kapal atau melakukan tindakan permusuhan lainnya, maka kami akan membalas menyerang mereka," ujarnya.

Selain persoalan keamanan maritim, Amerika Serikat juga menekan Iran terkait program nuklirnya.

Washington meminta Teheran menyerahkan material nuklir yang dianggap berisiko. Amerika Serikat menyebut Iran memiliki lebih dari 900 pon uranium dengan tingkat pengayaan tinggi.

KRONOLOGI 4 KALI PENUTUPAN SELAT HORMUZ OLEH IRAN

Penutupan Ke-1 | 28 Februari 2026

- Iran menutup total Selat Hormuz.
- Terjadi setelah konflik Iran-AS dan sekutu pecah.
- Respons atas serangan besar AS dan Israel ke wilayah Iran.

Penutupan Ke-2 | 11 Juni 2026

- IRGC kembali mengumumkan penutupan penuh selat.
- Dipicu serangkaian serangan baru militer AS terhadap Iran.
- Jalur pelayaran internasional kembali terganggu.

Penutupan Ke-3 | 20 Juni 2026

- Terjadi tiga hari setelah kesepakatan gencatan senjata Iran-AS.
- Iran menuding AS melanggar kesepakatan.
- Dipicu serangan Israel di Lebanon Selatan.

Penutupan Ke-4 | 12 Juli 2026

- Iran kembali memberlakukan blokade total.
- Konflik Iran-AS kembali pecah setelah gencatan senjata berakhir.
- IRGC menyatakan selat ditutup hingga AS menghentikan campur tangan di kawasan.

Presiden Trump menyatakan persoalan nuklir harus menjadi bagian dari kesepakatan lanjutan kedua negara.

"Saya hanya ingin menegaskan bahwa jika kami tidak mendapatkan debu itu, maka kami tidak memiliki kesepakatan dengan Iran," kata Trump.

Badan Energi Internasional (IEA) menilai pasar minyak global mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah terguncang konflik di Timur Tengah. Kembalinya arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz sempat mendorong penurunan harga minyak mentah, meski pasokan bahan bakar hasil kilang masih berada dalam kondisi ketat.

Dalam Oil Market Report Juli 2026, IEA menyebut konsumsi minyak dunia mulai pulih setelah mencapai titik terendah pada Mei 2026. Seiring membaiknya pasokan produk minyak, permintaan yang sebelumnya tertahan mulai kembali meningkat.

IEA memperkirakan kontraksi permintaan minyak global akan menyempit dari 4,8 juta barel per hari (bph) pada kuartal II 2026 menjadi 1,7 juta bph pada kuartal III. Pada kuartal IV 2026, konsumsi minyak diproyeksikan kembali tumbuh sekitar 1,2 juta bph.

Meski demikian, permintaan minyak global sepanjang 2026 masih diperkirakan turun sekitar 1 juta bph. Pada 2027, pertumbuhan konsumsi diproyeksikan mencapai 2 juta bph, tetapi angka tersebut masih berada di bawah tren pertumbuhan historis. (gus,rtr,ist/dya)

Bahaya di Balik Renyahnya Mi Instan Mentah

Sebuah kebiasaan yang tampak sepele dan kerap dianggap lumrah oleh anak-anak kini tengah memicu alarm kewaspadaan global di sektor keamanan pangan domestik.

Mengonsumsi mi instan langsung dari kemasannya tanpa dimasak terlebih dahulu, sebuah tren camilan praktis yang sangat digemari generasi muda, telah terbukti membawa risiko kesehatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Fenomena ini bukan lagi sekadar perdebatan mengenai tata cara makan yang sopan atau kurang sehat secara gizi, melainkan telah bergeser menjadi ancaman medis nyata setelah otoritas kesehatan internasional menemukan keterkaitan langsung antara kebiasaan mengunyah mi kering ini dengan lonjakan kasus infeksi pencernaan yang parah.

Bagi lingkungan keluarga, mi instan sering kali menjadi stok darurat di dapur, namun kemudahan akses ini justru menyimpan bahaya laten ketika anak-anak mulai memanfaatkannya sebagai camilan renyah siap santap tanpa pengawasan orang tua.

Kecenderungan anak-anak dan remaja untuk mengonsumsi produk tersebut secara langsung dari bungkusnya dipicu oleh teksturnya yang garing layaknya keripik komersial, ditambah dengan taburan bumbu instan yang memberikan sensasi rasa gurih yang kuat.

Pola konsumsi menyimpang ini semakin diperparah oleh pengaruh lingkungan sebaya serta minimnya pemahaman mereka mengenai karakteristik produk pangan olahan. Ban

yak yang keliru menganggap bahwa karena mi instan telah melalui proses penggorengan atau pengeringan di pabrik, maka produk tersebut sepenuhnya steril dan siap dikonsumsi dalam kondisi apa pun.

Kebiasaan keliru ini disoroti secara tajam oleh Ulrich Pinstrup, perwakilan dari the Danish Veterinary, Food, Agriculture and Fisheries Agency (Badan Veteriner, Pangan, Pertanian, dan Perikanan Denmark). Dia menegaskan bahwa mi kering tersebut bukanlah produk siap konsumsi yang aman dimakan mentah-mentah.

"Mi instan rasa adalah camilan cepat yang populer, dan kami mengalami tren di mana anak-anak dan remaja khususnya memakan produk tersebut langsung dari kemasan. Ini sama sekali tidak disarankan, karena produk tersebut belum siap untuk dimakan," terang Ulrich Pinstrup.

Ketika anak-anak melewati proses perebusan yang diinstruksikan oleh produsen, mereka telah meruntuhkan benteng pertahanan pertama tubuh dari paparan patogen. Di sinilah peran penting orang tua diuji untuk tidak lagi membiarkan anak-anak membeli atau mengonsumsi makanan instan tanpa adanya pengawasan ketat.

Ancaman Keracunan Salmonella

Kekhawatiran mengenai perilaku konsumsi mi mentah ini kian mendesak setelah European Food Safety Authority (EFSA) bersama European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) merilis laporan resmi mengenai wabah kontaminasi bakteri Salmonella Stanley yang

meluas secara masif. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sedikitnya 106 kasus infeksi yang terkonfirmasi secara laboratorium tersebar di 14 negara Eropa, termasuk Inggris Raya, Jerman, Denmark, Prancis, hingga kawasan Baltik seperti Lithuania dan Latvia.

Investigasi epidemiologi yang berjalan ketat mendapati fakta bahwa mayoritas korban merupakan anak-anak usia sekolah dasar serta dewasa muda, di mana hampir separuh dari total pasien yang terpapar terpaksa dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan intensif akibat komplikasi pencernaan yang akut.

Berdasarkan penelusuran mikrobiologis yang mendalam, strain bakteri berbahaya ini ditemukan melekat pada produk mi instan rasa ayam dan ayam pedas yang diproduksi oleh Euro Food Service di Ukraina dan didistribusikan di bawah merek Reevea.

Dari hasil penelusuran medis, anak-anak yang terinfeksi diketahui mengonsumsi mi instan tersebut dalam kondisi kering tanpa diproses dengan air panas.

Menanggapi situasi darurat ini, Dr. Gauri Godbole selaku Wakil Direktur Infeksi Saluran Pencernaan di UK Health Security Agency (UKHSA) memberikan pernyataan resmi mengenai fokus investigasi internasional yang sedang berjalan.

"Kami mendukung investigasi yang sedang berlangsung terkait wabah Salmonella internasional, dengan sebagian besar kasus yang dilaporkan terjadi pada anak-anak dan remaja," ujar Dr. Gauri Godbole.

Meskipun perusahaan produsen terkait di Eropa, Reevea Foods, telah

menyatakan komitmennya dengan menegaskan bahwa "keselamatan konsumen adalah prioritas utama kami" serta menarik produk terkontaminasi dari peredaran, risiko di tingkat rumah tangga tetap harus diwaspadai.

Kontaminasi ini membuktikan bahwa bakteri pencernaan seperti Salmonella memiliki ketahanan tinggi pada bahan pangan kering, terutama jika bumbu atau komponen olahan daging ayam di dalamnya tidak dipanaskan secara sempurna menggunakan air mendidih.

Secara klinis, infeksi bakteri Salmonella atau salmonellosis bermanifestasi melalui gejala yang sangat menyiksa tubuh anak, mulai dari kram perut parah, diare cair akut yang terkadang disertai darah, demam tinggi, hingga muntah-muntah hebat.

Pada anak-anak dengan sistem imunitas yang masih berkembang, kondisi ini dengan cepat dapat memicu dehidrasi berat yang mengancam jiwa jika tidak segera ditangani secara medis.

Sebagai langkah antisipasi domestik, para ahli kesehatan menekankan pentingnya penerapan protokol kebersihan yang kaku di area dapur keluarga.

Selain kewajiban memasak makanan instan hingga matang sempurna, tindakan sesederhana mencuci tangan dengan sabun secara menyeluruh sebelum menyentuh makanan dan setelah menggunakan fasilitas sanitasi menjadi kunci utama memutus mata rantai penyebaran bakteri jahat ini di dalam rumah. (iwt/dya)



Tembok Hijau Afrika Mimpi Menghentikan Sahara



Setiap tahun, hamparan kering di Afrika bergerak sedikit demi sedikit ke arah selatan. Bukan karena gurun berpindah tempat, melainkan karena lahan-lahan subur di kawasan Sahel perlahan kehilangan daya hidupnya.

Pohon menghilang, tanah mengeras, hujan semakin sulit diprediksi, dan hasil panen terus menurun. Di wilayah yang membentang dari Senegal hingga Sudan itu, perubahan iklim bukan lagi sekadar istilah ilmiah. Ia hadir sebagai musim tanam yang gagal, sumur yang mengering, dan penghasilan yang terus menyusut.

Di tengah situasi tersebut, negara-negara Afrika memilih melawan dengan cara yang tidak biasa. Mereka membangun "tembok" sepanjang hampir 8.000 kilometer. Bukan dari

batu, melainkan dari bentang alam yang dipulihkan. Mulai dari hutan, padang rumput, lahan pertanian, rawa, dan vegetasi asli. Inilah Great Green Wall atau Tembok Hijau Besar, proyek restorasi ekologi terbesar yang pernah digagas di benua Afrika.

Inisiatif itu diluncurkan African Union pada 2007. Jalurnya membentang dari Senegal di pesisir Samudra Atlantik hingga Djibouti di tepi Laut Merah. Kawasan yang dilalui adalah Sahel, sabuk semi-kering yang menjadi batas alami antara Gurun Sahara dan wilayah tropis Afrika.

Selama puluhan tahun, kawasan ini menghadapi kombinasi kekeringan berkepanjangan, penggundulan

hutan, pertumbuhan penduduk, serta eksploitasi lahan yang membuat tanah kehilangan kesuburannya. Pada awalnya, Great Green Wall dibayangkan sebagai barisan pepohonan yang memanjang melintasi Afrika. Namun konsep itu segera dianggap terlalu sederhana untuk menjawab persoalan yang jauh lebih kompleks. Para peneliti menemukan bahwa tidak semua wilayah membutuhkan penanaman pohon.

Sebagian kawasan justru lebih membutuhkan pemulihan tanah, pengelolaan air, perlindungan vegetasi yang masih tersisa, atau regenerasi alami hutan. Sejak saat itu, proyek bergeser dari sekadar penghijauan menjadi restorasi bentang alam secara menyeluruh.

Pendekatan baru tersebut menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Petani didorong memanfaatkan kembali spesies pohon lokal yang tahan kekeringan, mengembangkan sistem agroforestri, membangun penampungan air hujan, hingga menghidupkan kembali padang penggembalaan.

Tujuannya bukan hanya menghentikan penggurunan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sehingga kawasan yang dipulihkan tetap terjaga.

Target proyek ini sangat ambisius. Pada 2030, Great Green Wall ditargetkan mampu memulihkan 100 juta hektare lahan yang terdegradasi, menyerap sekitar 250 juta ton karbon dioksida, dan menciptakan 10 juta lapangan kerja hijau.

Angka-angka tersebut menjadikan Great Green Wall sebagai salah satu proyek solusi berbasis alam terbesar dalam agenda mitigasi perubahan iklim dunia.

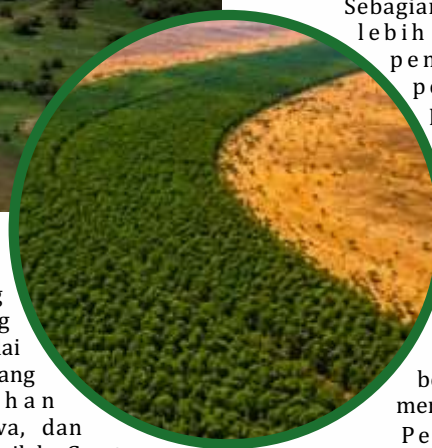
Namun perjalanan menuju target itu tidak mudah. Hingga kini, kemajuannya masih jauh dari harapan. Reuters, mengutip Presiden Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penanggulangan Penggurunan (UNCCD), Alain Richard Donwahi, melaporkan bahwa proyek tersebut baru mencapai sekitar 30 persen dari target yang direncanakan.

Sekitar 30 juta hektare lahan telah berhasil dipulihkan dan sekitar tiga juta lapangan kerja telah tercipta, tetapi laju tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi target 2030.

Persoalan terbesar bukan terletak pada kemampuan menanam pohon, melainkan pendanaan dan tata kelola. Pada Konferensi One Planet Summit 2021, komunitas internasional menjanjikan dukungan sekitar US\$19 miliar bagi Great Green Wall.

Namun menurut Reuters, dana yang benar-benar mengalir hingga pertengahan 2024 baru sekitar US\$2,5 miliar. UNCCD memperkirakan proyek ini masih membutuhkan sedikitnya US\$33 miliar tambahan agar target restorasi dapat tercapai.

Selain masalah pembiayaan, situasi keamanan di sejumlah negara Sahel ikut memperlambat pelaksanaan proyek. **(ist/dya)**



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Skincare Remaja Tak Perlu Rumit, 4 Langkah Sederhana Paling Efektif

Di era media sosial, rutinitas perawatan kulit atau skincare routine telah menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang, termasuk remaja. Setiap hari, beranda media sosial dipenuhi video yang menampilkan belasan produk perawatan kulit, mulai dari cleanser, toner, essence, berbagai jenis serum, pelembap, hingga sleeping mask.

Tidak sedikit pula konten yang menampilkan rutinitas pagi dan malam dengan lebih dari sepuluh tahapan. Bagi sebagian remaja, tren tersebut memunculkan anggapan bahwa semakin banyak produk yang digunakan, semakin baik pula hasil yang akan diperoleh. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Para dermatolog justru menekankan bahwa kulit remaja memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kulit orang dewasa. Pada masa remaja, kulit masih berada dalam tahap perkembangan dan umumnya memiliki kemampuan alami untuk menjaga kelembapan serta memperbaiki lapisan pelindung kulit.

Empat langkah dasar dinilai sudah cukup untuk menjaga kulit tetap sehat, bersih, dan terlindungi.

Mengenal Jenis Kulit

Perawatan kulit yang efektif selalu diawali dengan mengenali jenis kulit. Langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru menjadi fondasi dalam menentukan produk yang tepat.

Secara umum, kulit dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu normal, kering, berminyak, kombinasi, sensitif, dan kulit yang rentan berjerawat. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan perawatan yang berbeda pula.

Kulit berminyak, misalnya, cenderung menghasilkan sebum berlebih sehingga lebih mudah mengalami penyumbatan pori dan munculnya jerawat. Sebaliknya, kulit kering membutuhkan produk yang mampu mempertahankan kelembapan agar tidak mudah mengelupas atau terasa tertarik. Sementara itu, kulit sensitif memerlukan produk dengan kandungan yang lembut agar tidak mudah mengalami iritasi.

Kesalahan memilih produk sering kali berawal dari ketidaktahuan terhadap jenis kulit sendiri. Tidak sedikit remaja menggunakan produk yang sedang viral tanpa mempertimbangkan apakah kandungannya sesuai dengan kondisi kulit mereka.

Dermatolog juga mengingatkan agar tidak mencoba banyak produk baru secara bersamaan. Cara terbaik adalah memperkenalkan satu produk baru dalam satu waktu dan menggunakannya selama beberapa minggu.

Membersihkan Wajah

Tahapan berikutnya adalah membersihkan wajah. Meskipun

terdengar sederhana, membersihkan wajah merupakan langkah paling mendasar dalam menjaga kesehatan kulit.

Sepanjang hari, wajah terpapar debu, polusi, keringat, minyak alami, serta sisa produk perawatan maupun tabir surya. Apabila tidak dibersihkan dengan baik, kotoran tersebut dapat menyumbat pori-pori dan memicu munculnya komedo maupun jerawat.

Namun, membersihkan wajah bukan berarti harus menggunakan produk yang membuat kulit terasa sangat kesat. Justru rasa kesat yang berlebihan sering kali menandakan bahwa lapisan pelindung alami kulit ikut terangkat.

Karena itu, pilihlah pembersih wajah yang memiliki formula lembut, tidak mengandung pewangi berlebihan, serta bersifat non-komedogenik sehingga tidak mudah menyumbat pori-pori. Mencuci wajah dua kali sehari, yaitu pada pagi hari sebelum memulai aktivitas dan malam hari sebelum tidur, umumnya sudah cukup untuk menjaga kebersihan kulit.

Membersihkan wajah terlalu sering justru dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembapan alaminya. Sebagai respons, kulit akan memproduksi minyak lebih banyak sehingga wajah tampak semakin berminyak.

Pelembap Tetap Dibutuhkan

Masih banyak remaja yang menganggap pelembap hanya diperuntukkan bagi kulit kering.

Padahal, semua jenis kulit membutuhkan pelembap, termasuk kulit berminyak dan berjerawat.

Pelembap berfungsi membantu mempertahankan kadar air dalam kulit sekaligus menjaga lapisan pelindung kulit agar tetap bekerja secara optimal. Ketika kulit kehilangan kelembapan, tubuh justru dapat memproduksi minyak lebih banyak sebagai mekanisme pertahanan alami. Akibatnya, wajah menjadi semakin berminyak.

Bagi pemilik kulit berminyak, pelembap dengan tekstur gel atau lotion ringan biasanya lebih nyaman digunakan karena cepat meresap dan tidak meninggalkan rasa lengket. Sementara bagi kulit kering, pelembap dengan tekstur krim dapat memberikan kelembapan yang lebih tahan lama.

Sunscreen Tidak Boleh Dilewatkan

Jika hanya boleh memilih satu produk selain pembersih wajah, banyak dokter kulit akan merekomendasikan sunscreen sebagai pilihan utama.

Paparan sinar ultraviolet terjadi setiap hari, bahkan ketika cuaca mendung atau saat seseorang lebih banyak berada di dalam ruangan yang tetap menerima cahaya matahari melalui jendela. Tanpa perlindungan, sinar UV dapat menyebabkan kulit terbakar, munculnya flek hitam, mempercepat tanda-tanda penuaan dini, hingga meningkatkan risiko kanker kulit. (ist/dya)

MENAKAR NYALI...dari hal 1

Pelimpahan penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik.

Langkah tersebut dilakukan setelah Febrie ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi. Namun, keputusan pelimpahan perkara pada tahap penyidikan menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait mekanisme hukum yang digunakan.

Sejumlah pakar hukum pidana menilai, pelimpahan perkara pada tahap penyidikan perlu memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam sistem hukum acara pidana, kewenangan penyidikan dan penuntutan memiliki batas fungsi masing-masing.

Berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyidikan, sedangkan kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan.

Pelimpahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan pada umumnya dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 untuk memasuki tahap penuntutan.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mempertanyakan dasar hukum pelimpahan perkara tersebut.

"Keputusan ini tidak memiliki dasar hukum karena pelimpahan ataupun pengambilalihan perkara hanya dimungkinkan jika dilakukan oleh KPK. Kejaksaan tidak punya kewenangan itu dan memang tidak ada mekanisme untuk melimpahkan perkara pada tahap penyidikan," ujar Zaenur dikutip Minggu (12/7/2026).

Menurut Zaenur, penanganan perkara oleh institusi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pihak yang diperiksa perlu mendapat perhatian serius terkait aspek independensi dan objektivitas.

Ia juga mempertanyakan proses penetapan tersangka terhadap Febrie, termasuk pemenuhan prosedur pemeriksaan awal sebagai saksi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Kortastipidkor Polri menyebut pelimpahan perkara dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Agung dalam rangka sinergi antarpenghak hukum.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen

Pol. Totok Suharyanto mengatakan penanganan tiga perkara yang melibatkan Febrie telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

"Kami telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan penyidik Polri terhadap tiga perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas," kata Totok.

Plt Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Rudi Margono, menyatakan pihaknya siap menerima pelimpahan berkas perkara, tersangka, serta barang bukti secara bertahap.

Menurut Rudi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan efektif.

Dalam perkara yang ditangani, Febrie Adriansyah disebut terkait dengan tiga dugaan tindak pidana korupsi. Perkara tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU, dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020-2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI.

Kabag Operasi Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi menyampaikan, penyidik telah melakukan serangkaian langkah hukum untuk mengungkap perkara tersebut.

Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa 15 orang saksi dan dua orang ahli. Selain itu,

pengeledahan dilakukan di 13 lokasi yang berada di wilayah Jakarta dan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Robertus Yohanes De Deo menjelaskan, salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi pengadaan batu bara yang berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

Menurut Robertus, dugaan praktik tersebut berdampak terhadap gangguan pasokan bahan bakar pembangkit listrik. Kondisi itu disebut berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun," ujar Robertus.

Dalam perkara tersebut, Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pihak swasta berinisial Don Ritto (DR).

Selain proses penyidikan, perhatian publik juga tertuju pada rangkaian pengeledahan yang dilakukan penyidik. Salah satunya terjadi di kediaman Febrie di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Dalam proses tersebut, sempat terjadi dinamika di lapangan terkait pengamanan lokasi. Sejumlah pihak menyoroti keterlibatan personel berseragam militer yang berada di

sekitar lokasi pengeledahan.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, meminta agar dugaan adanya upaya menghambat proses penyidikan diperiksa secara serius.

Menurut Hendardi, setiap bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum harus menjadi perhatian karena dapat mengganggu independensi penyidikan. (tin,rls,ant,kcm/dya)

LHKPN FEBRIE ADRIANSYAH (PERIODE 2025)

Total Kekayaan

Rp 18,26 Miliar



Tanah & Bangunan
Rp 14,85 miliar



Kendaraan & Mesin
Rp 2,31 miliar



Kas & Setara Kas
Rp 938,12 juta



Harta Bergerak Lainnya
Rp 60 juta



Harta Lainnya
Rp 100 juta



Utang
Tidak Ada



DPR Bentuk Panja dan Desak Ada Tim Independen

KASUS dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memasuki babak baru. Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) untuk mengawasi penanganan perkara sekaligus mendesak Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik independen yang bebas dari konflik kepentingan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembentukan Panja merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Menurutnya, Panja akan memantau setiap tahapan penyidikan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sekaligus memastikan hak-hak tersangka tetap dihormati.

"Komisi III secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan

pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk Panja, panitia kerja," kata Habiburokhman.

Ia menegaskan, Panja juga dibentuk untuk mencegah munculnya konflik horizontal di antara aparat penegak hukum. Habiburokhman mengingatkan perkara tersebut menyangkut dugaan perbuatan oknum, bukan institusi.

"Komisi III mengambil inisiatif memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan bisa berjalan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," ujarnya.

Selain membentuk Panja, Komisi III meminta Kejaksaan Agung segera membentuk tim penyidik independen yang tidak memiliki hubungan maupun afiliasi dengan Febrie Adriansyah. Tim tersebut diharapkan dapat menangani perkara secara objektif dan menjaga

kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

"Komisi III DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA," kata Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat Komisi III.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan usulan pembentukan tim independen telah disampaikan langsung kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, penyidik yang benar-benar netral menjadi syarat penting agar pengusutan perkara berjalan profesional dan menjadi momentum pembenahan iklim penegakan hukum di Indonesia. (wid,rls/dya)



DPRD JATIM SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025



Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Jatim, Jumat (10/07/2026) dalam Agenda Penyampaian Pandangan Komisi terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025

SURABAYA- DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Jumat (10/7/2026).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan, pandangan yang disampaikan masing-masing komisi merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD sekaligus masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

"Penyampaian pandangan komisi atas pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi pijakan untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur," ujar Deni, Senin (13/7/2026).

Lebih lanjut, Komisi E DPRD Jatim menaruh perhatian pada sektor pendidikan, khususnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Juru Bicara Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025 terdapat 1.864.301 penyandang disabilitas di Jawa Timur. Dari jumlah itu, 11.658 anak usia 6-18 tahun tercatat tidak atau belum pernah bersekolah maupun telah putus

sekolah.

"Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas masih belum mendapatkan perhatian yang maksimal," ungkap Puguh.

Ia juga menyoroti rasio Guru Pendidikan Khusus (GPK) dengan peserta didik penyandang disabilitas yang masih sekitar 1:27, jauh dari rasio ideal 1:5.

"Sehingga akses, layanan pendidikan inklusif, dan pendampingan pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas belum optimal," ujarnya.

Karena itu, Komisi E merekomendasikan Pemprov Jatim memperluas pendidikan inklusif, menambah Guru Pendidikan Khusus, memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD), menyediakan sarana-prasarana yang aksesibel, serta membangun sistem pendataan disabilitas yang terintegrasi.

Sementara itu, Komisi C DPRD Jatim mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan diversifikasi usaha dan investasi produktif agar mampu memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru Bicara Komisi C, Hartono, mengatakan investasi BUMD perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti energi, kawasan industri, logistik, perdagangan, pangan dan agroindustri, infrastruktur, serta ekonomi hijau.

"Dengan demikian, BUMD tidak hanya berperan sebagai penyumbang dividen, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah," ujar Hartono.

Komisi C juga meminta Biro Perekonomian memperkuat pembinaan terhadap BUMD melalui peningkatan tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, inovasi bisnis, optimalisasi aset, dan penyusunan

business roadmap yang terukur. Meski realisasi dividen BUMD pada 2025 mencapai Rp488,61 miliar atau 100,10 persen dari target, Komisi C menilai kontribusi tersebut masih didominasi oleh PT Bank Jatim Tbk dan PT Petrogas Jatim Utama.

"Komisi C mencermati bahwa kontribusi dividen masih didominasi oleh beberapa BUMD tertentu, khususnya PT Bank Jatim Tbk dan PT Petrogas Jatim Utama, sedangkan kontribusi BUMD lainnya masih relatif terbatas," katanya.

Di bidang infrastruktur, Komisi D DPRD Jatim menyoroti perubahan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Anggaran 2025 yang dinilai tidak melalui mekanisme pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD.

Juru Bicara Komisi D, Siadi, mengungkapkan anggaran Dinas PU Bina Marga berubah dari sekitar Rp1,3 triliun menjadi Rp1,5 triliun tanpa melalui pembahasan di Banggar.

"Komisi D melihat adanya perubahan anggaran di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur tahun 2025 tanpa melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Jawa Timur. Dari semula Rp1,3 triliun tiba-tiba berubah menjadi Rp1,5 triliun," tegasnya.

Komisi D juga mengevaluasi rendahnya serapan anggaran Dinas PU Bina Marga yang hanya mencapai sekitar 80 persen, yakni Rp1,268 triliun dari total anggaran Rp1,584 triliun. Selain itu, target Indeks Konektivitas Jawa Timur sebesar 0,848 hanya terealisasi 0,841, sementara 48,35 persen jalan provinsi belum memenuhi standar lebar jalan 7 meter.(adv,pra/dya)



Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas



Juru Bicara Komisi D DPRD Jatim, Siadi



Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Hartono